

PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF ELITE AGAMA DI KOTA MALANG

Pluralism and Religious Harmony in Religious Elites Perspectives in Malang City

UMI SUMBULAH

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Malang 55154, Telp.
0341-559399
Email : ummisumbulah@gmail.com
Naskah diterima : 31 Januari 2015
Naskah direvisi : 23 Maret – 7 April
2015
Naskah disetujui : 22 Juni 2015

ABSTRACT

This study aims to understand the religious elite view of pluralism and religious harmony in Malang. The study was focused on the meaning of pluralism and religious harmony, efforts and things that support and hinder the realization of religious harmony. Empirical research data with qualitative-phenomenological approach was collected through interviews and documentation. The results show: first, the meaning of religious pluralism for the religious elites is very varied, which is the same as tolerance, mutual respect, the goal of all religions are the same, and recognize the fact that there are many religions in this world. Second, religious harmony have meaning as a condition where there is no oppression and domination of one religion over other religions, awakening a deep awareness of diversity, respect for human rights, and the willingness to spread kindness and love for fellow human beings. Third, religious harmony can be achieved through internal efforts to strengthen the faith of each and build awareness to develop a positive attitude towards other religions. In external efforts to create harmony done through emancipatory dialogue and cooperation to resolve humanitarian issues. Fourth, positive attitude that supports the creation of harmony of religions is the willingness and awareness to understand each other and share experiences. Egoism, truth claims, fanaticism, and exclusivism is a negative attitude and expression recognized by the religious elite can interfere with the establishment of inter-religious harmony.

Keywords: pluralism, tolerance, religious harmony.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan elite agama tentang pluralisme dan kerukunan umat beragama di Kota Malang. Kajian difokuskan pada makna pluralisme dan kerukunan umat beragama, upaya-upaya serta hal-hal yang mendukung dan menghambat terwujudnya kerukunan umat beragama. Data penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif-fenomenologis ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, makna pluralisme agama bagi elite agama-agama sangat variatif, yakni sama dengan toleransi, saling menghargai, tujuan semua agama sama, dan menyadari kenyataan bahwa terdapat banyak agama di dunia ini. Kedua, kerukunan umat beragama memiliki makna sebagai suatu kondisi dimana tidak ada opresi dan dominasi satu agama atas agama lain, terbangunnya kesadaran mendalam atas keragaman, penghormatan atas hak asasi manusia, dan kemauan untuk menebar kebaikan dan cinta kasih kepada sesama manusia. Ketiga, kerukunan umat beragama dapat diwujudkan melalui upaya-upaya intern dengan penguatan keimanan masing-masing dan membangun kesadaran untuk mengembangkan sikap positif terhadap agama lain. Secara eksternal upaya menciptakan kerukunan dilakukan melalui dialog emansipatoris dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Keempat, sikap positif yang mendukung terciptanya harmoni agama-agama adalah adanya kemauan dan kesadaran untuk saling memahami dan berbagi pengalaman. Egoisme, truth claim, fanatisme, dan eksklusivisme merupakan sikap dan ekspresi negatif yang disadari oleh para elite agama dapat mengganggu terbangunnya keharmonisan antarumat beragama.

Kata kunci : pluralisme, toleransi, kerukunan umat beragama.

Kata kunci: pluralisme, toleransi, kerukunan beragama..

PENDAHULUAN

Fokus masalah penelitian ini adalah makna pluralisme agama dan kerukunan umat beragama dalam konstruksi elite agama-agama di Kota Malang. Hasil penelitian ini memiliki signifikansi teoretik yakni memberikan pemahaman baru tentang pola relasi dan konstruk elite agama-agama tentang pentingnya membangun kebersamaan dan persaudaraan sejati. Signifikansi praktis hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam upaya menciptakan keharmonisan antaragama yang menjunjung prinsip toleransi dan penghargaan atas kemanusiaan. Dalam konteks relasi agama-agama, diskursus pluralisme dan kerukunan merupakan entitas penting yang harus dipahami, dalam rangka membangun kesadaran semua umat beragama untuk mewujudkan keharmonisan dalam keragaman.

Dalam pandangan pluralisme, kebenaran tidak hanya didasarkan kriteria logika tetapi juga kriteria kebenaran lainnya. Pandangan Leibniz dan Russel ini menolak kriteria kebenaran monisme (Fannani, 2003: 9). Oleh karena itu, prinsip-prinsip pluralisme dinilai dapat menjawab permasalahan dengan banyak alternatif penyelesaian. Pluralisme agama diartikan sebagai pandangan dan sikap bahwa hakikat agama tidak hanya satu tetapi banyak dan beragam. Dengan demikian, pluralisme agama dapat diartikan sebagai suatu teori yang merujuk pada hubungan antara berbagai tradisi agama, perbedaan dan klaim-klaim kompetisinya. Armstrong (2001:27) mengilustrasikan bahwa agama-agama besar di dunia memiliki konsepsi yang beragam tentang Tuhan. Pemahaman tentang pluralisme dapat membantu umat beragama dalam membangun dialog menuju keharmonisan dan kerukunan berdasarkan nilai ketuhanan.

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Konsep kerukunan ini merupakan acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meretakkan sendi-sendi

keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Kerukunan umat beragama di Indonesia mencakup tiga dimensi, yakni: kerukunan inter-umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ketiga dimensi inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan setiap umat beragama, untuk membangun kerukunan dan keharmonisan. Dalam mewujudkan trilogi kerukunan, diterbitkan regulasi dan perundang-undangan, serta intensifikasi dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah hubungan umat beragama (Mawardi, 1981: 9). Toleransi beragama hanya bisa berjalan dengan baik apabila ada *mutual trust* di antara komunitas umat beragama. Berkembangnya kekuatan *civil society* adalah angin segar yang menjanjikan keharmonisan itu hadir dan menghiasi perjalanan sejarah bangsa, yang oleh banyak pihak dinilai paling santun dan toleran ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada elite agama-agama di Kota Malang, dengan pertimbangan: 1) Malang merupakan salah satu wilayah yang menjadi "lahan subur" bagi tumbuhnya agama-agama besar dunia terkait sejarah sosial kota ini sejak era kolonial; 2) heterogenitas afiliasi keagamaan, yang ditunjukkan data statistik bahwa umat Islam menempati urutan pertama, disusul Kristen (Protestan), Kristen (Katolik), Hindu, Budha dan Konghucu; 3) maraknya lembaga-lembaga kerjasama lintas agama, baik yang diprakarsai pemerintah maupun lembaga *civil society* lainnya yang mengampanyekan harmonisasi agama-agama, juga menjadi pertimbangan menarik. Penelitian yang tergolong pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis (Maliki, 2003: 235-236) ini terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas subyektif berupa upaya memperoleh perspektif emik elite agama-agama. Pemilihan informan kunci dilakukan dengan teknik sampel bertujuan mendeskripsikan temuan penelitian (Moleong, 2002: 165-166). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara

mendalam, Diskusi Kelompok Terfokus (DKT), dan dokumentasi untuk mengambil data-data tertulis yang mendukung fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis melalui *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifying* (Denzin dan Lincoln, 1994). Penelitian ini juga menempuh prosedur pengujian keabsahan data, yakni: memperpanjang masa observasi, melakukan triangulasi metode dan sumber, mengadakan *member check*, dan *peer debriefing* (Nasution, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Pluralisme Agama

Elite agama-agama di Malang memiliki pandangan beragam tentang makna Pluralisme agama. Di antaranya ada yang menyamakan dengan toleransi, saling menghargai, tujuan semua agama sama, dan menyadari kenyataan bahwa terdapat banyak agama di dunia ini. Elite Islam NU, Gus Shampton (*wawancara*, 23-6-2014), menegaskan bahwa pluralisme memiliki arti adanya saling menghargai, namun menolak anggapan bahwa semua agama benar adanya. Kepala KUALowokwaru ini juga menyangkal bahwa Gus Dur yang dinilai banyak kalangan sebagai ulama dan pemikir liberal itu telah mengajarkan persamaan semua agama. Baginya Gus Dur tidak pernah mengajarkan bahwa semua agama itu sama, sebagaimana terlihat dalam konsep *lakum dīnukum waliyā dīn* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Elite Islam dari Muhammadiyah, Agus Purwadyo (*wawancara*, 23-6-2014), membedakan makna pluralisme dengan pluralitas. Ia menganggap pluralitas agama sebagai realitas sosial, yang memungkinkan pengakuan terhadap enam kelompok agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Mereka beribadah sesuai keyakinan masing-masing, tanpa hak bagi satu kelompok untuk mengganggu dan menghalangi kelompok lain, minoritas menghormati mayoritas dan mayoritas melindungi minoritas, hidup dalam penghormatan dan penghargaan. Kerukunan yang tercipta di kota Malang terkategori pada model kerjasama sosial-kemanusiaan dan tidak mengarah pada hal-hal yang bersifat teologis

(Sumbulah dan Nurjanah, 2012:131). Hal ini bisa dilihat pada medan budaya kerukunan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, seperti bekerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.

Pluralisme agama dan Islam pluralis, dipandang oleh banyak kalangan sebagai pengembangan secara liberal dari Islam inklusif. Bagi para penganut paham ini semisal Seyyed Hossein Nasr dan Fritjhof Schuon, setiap agama pada dasarnya terbentuk oleh perumusan iman dan pengalaman iman. Ketika Islam mengharuskan seseorang memiliki iman (*tawhid*) baru disusul pengalaman iman (amal shalih), maka dalam perspektif Kristiani seseorang harus lebih dahulu memiliki pengalaman iman baru disusul perumusan imannya. Tujuan para pendukung teologi pluralis bukanlah keseragaman bentuk agama, namun mengekspresikan fenomena satu Tuhan banyak agama. Setiap agama, dalam pandangan pluralis merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Demikian pandangan (Schuon, 1993:33), yang memetakan wilayah agama dalam dataran eksoterik dan esoterik. Dalam level eksoterik satu agama berbeda dengan agama lain, tetapi dalam dataran esoterik relatif sama.

Elite Kristiani, Pdt Kusumo Rahardjo (*wawancara*, 24-6-2014), berpandangan bahwa pluralisme adalah menerima kebenaran agama lain. Dalam konteks ini maksudnya adalah bahwa semua agama memiliki ajaran yang benar, semua harus mengasihi dan tidak merasa benar sendiri. Pdt Budiono (*wawancara*, 28-6-2014), berpendapat pluralisme adalah paham sekuler yang memandang semua agama sama, misalnya pemahaman tentang Tuhan, meski semua mengakui satu Tuhan tetapi penafsiran dan pemahaman manusia tentang Tuhan berbeda-beda. Romo Felix Suyatno (*wawancara*, 24-6-2014) memandang pluralisme agama sebagai kenyataan adanya banyak agama. Pdt. Nugraha (*wawancara*, 21-6-2014) menyatakan bahwa pluralisme agama melahirkan pandangan yang beragam tentang Tuhan dan cara menyembahnya sesuai dengan keimanan masing-masing. Sese-

orang yang beragama Katolik akan menyembah Tuhan sebagaimana keyakinan iman Katolik, meskipun sebenarnya Tuhan bukanlah Katolik. Romo Felix juga menegaskan bahwa pluralisme agama, khususnya Islam, Kristen dan Yahudi berasal dari rumpun yang sama, dari Nabi Ibrahim. Agama-agama Ibrahim memiliki dua keterpautan, yakni: **pertama**, secara *genealogies* berasal dari keturunan yang sama, yakni Ibrahim dari jalur Ishaq untuk Kristen dan Yahudi, dan keturunan Ibrahim dari jalur Ismail bagi Islam; **kedua**, ketiganya juga memiliki keterpautan teologis karena memiliki kesamaan ajaran, monoteisme. Posisi dan kesinambungan risalah Islam dengan agama-agama sebelumnya ini dikukuhkan dalam al-Qur'an, 33:7, 40:78 dan 33:40. Bahkan dalam hadisnya, Nabi SAW mengilustrasikan sebuah bangunan yang belum sempurna karena kurang satu batu bata. Ibarat bangunan, Islam telah selesai dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya dan hanya kurang satu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang yang mengelilingi bangunan itu mengagumi keindahannya, namun menyangkan satu bagian yang batanya belum terpasang. Nabi menyatakan bahwa dia adalah bata yang dipasang di sudut yang kurang itu, sehingga bangunan menjadi sempurna (al-Bukhārī, 1994: 196).

Pandangan elite Hindu tentang pluralisme diperoleh dalam wawancara dengan Suwardika (17-6-2014), bahwa perbedaan adalah absah sebagaimana keragaman dalam agama Hindu. Agung (wawancara, 17-6-2014) memandang pluralitas sebagai manifestasi dari *vibhuti* (kemahakuasaan) Hyang Widhi. Di balik bermacam-macam maya di jagad raya, ada Realitas yang bersumber dan bermuara pada keesaan-Nya (Mathar, 2005:282). Dalam konteks ini, umat Hindu dituntut mampu memberikan penghargaan, karena pluralitas adalah suatu kenyataan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Muhaimin AG, 2004: 49). Elite Budha, Bhiku Khantidaro (wawancara, 14-6-2014), menyatakan bahwa semua agama memiliki tujuan sama, yakni mengajak umatnya menjadi orang baik, menghindari kejahatan dan keburukan. Dengan demikian, semua agama mempunyai tujuan yang sama, namun menempuh jalan yang

berbeda-beda. Jika ingin mencapai tujuan yang sama, atau mencapai hidup yang bahagia maka semua umat beragama harus saling membantu dan menolong sesuai kemampuan masing-masing. Menurut Vimalaseno (wawancara, 22-6-2014), pluralisme adalah kemampuan memahami perbedaan sehingga menerima agama lain. Tejaseno (wawancara, 22 -6-2014) memandang pluralisme sebagai keberagaman. Dengan perbedaan setiap agama, maka dituntut bisa menerima dan saling tenggang rasa. Menurutny inti pluralisme adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Ratanajayo (wawancara, 14-6-2014) berpandangan bahwa pluralisme berarti mengakui kebenaran agama sendiri dan menerima kebenaran agama lain. Dengan paham pluralisme, umat beragama akan bisa bersifat inklusif dan pluralis, karena menghormati fakta keberbagaian, dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri, dan tidak harus menganggap bahwa semua keyakinan adalah sama (Rahman, 2010: 38-39).

Pluralisme dan pluralitas merupakan dua term yang sering digunakan secara bergantian tanpa ada penjelasan apakah dua kata tersebut memiliki arti sama atau berbeda. Adakalanya pluralisme dan pluralitas diartikan sama, yakni sebuah keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. Pluralisme sebenarnya bukan hanya sekedar keadaan yang bersifat plural atau sekedar pengakuan bahwa heterogenitas itu ada dalam realitas. Sejatinya pluralisme merupakan sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, mengembangkan dan memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut. Dalam konteks agama-agama, pluralisme mengacu kepada teori bahwa semua agama, meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, menuju kepada satu tujuan yang sama, Yang Absolut, Yang Terakhir, yakni Tuhan (Kuntowibisono, 2003). Locke mendasarkan pemikirannya bukan pada wahyu dan keimanan, tetapi logika dan argumentasi hukum kodrat dan rasionya. Haryatmoko (1999) merangkum ajaran toleransi dan kebebasan beragama yang digagas Locke dalam tiga butir: 1) hanya ada satu jalan atau agama yang benar; 2) tidak seorangpun yang akan diselamatkan bila tidak percaya kepada agama

yang benar; 3) kepercayaan didapat manusia melalui akal budi dan argumen, bukan melalui kekuatan mempropagandakan kebenaran dan keselamatan (Fannani, 2003: 23).

Makna Kerukunan Umat Beragama

Elite Islam, Agus Purwadyo memaknai kerukunan umat beragama dengan membaginya pada kerukunan intern dan antarumat beragama. Kerukunan intern umat beragama mengharuskan lebih bertoleransi terhadap sesama umat Islam, dengan syarat kelompok tertentu tidak memiliki akidah dan keyakinan yang berbeda dengan Islam *mainstream*, seperti Ahmadiyah dan Syi'ah. Kerukunan antarumat beragama artinya saling menghormati dan tenggang rasa terhadap umat beragama lain. Ketika umat Nasrani merayakan Natal misalnya, kita mempersilahkan dan membantu pengamanan polisi, tentara, dan lain-lain. Sebaliknya ketika umat Islam melaksanakan Shalat Ied, yang bisa saja mengganggu keseharian mereka karena jatuh pada hari Minggu bertepatan dengan jadwal ibadah mereka, toleransi juga dirasakan umat Islam. Selama ini di Malang "*everything is running well* untuk urusan antarumat beragama" (Agus Purwadyo, *wawancara*, 22-6-2014). Menurut KH Chamzawi (*wawancara*, 25-6-2014), kerukunan umat beragama bisa dilakukan dalam hal-hal yang tidak berkenaan dengan akidah, seperti berkerjasama mengentaskan kemiskinan dan memberikan bantuan bagi para korban bencana atau musibah tertentu. Berdasarkan QS.al-Kafirun, elite NU ini menyatakan bahwa umat Islam tidak menyembah apa yang mereka (orang beragama lain) sembah dan sebaliknya. Dasar historis membangun kerukunan adalah Piagam Madinah, yang memberikan perlindungan kepada umat non Muslim. Senada dengan KH. Chamzawi, menurut Gus Shampton (*wawancara*, 23-6-2014), rukun bermakna saling menghargai satu dengan yang lain, dengan basis historis praktik toleransi dan kerukunan umat beragama seperti dalam Piagam Madinah.

Piagam Madinah merupakan undang-undang yang sangat spesifik dan modern. Hal ini karena konstitusi yang dirumuskan Nabi Muhammad

bersama masyarakat Madinah itu merupakan undang-undang pertama yang secara teoretis maupun praksis belum pernah terpikirkan apalagi dilaksanakan oleh imperium besar seperti Romawi-Byzantium dan Sasania-Zoroaster, dan imperium lainnya baik di Barat maupun Timur. Dalam konteks ini, seorang pemikir liberal Turki, Ali Bullac (2001), menyatakan bahwa Konstitusi Madinah merupakan komitmen kontrak sosial yang menyatukan semua elemen Madinah dalam kesatuan sosial politik dan bukan kesatuan religius, yang belakangan dikenal dengan sebutan *ummah*. Piagam yang terdiri dari 47 pasal ini berperan sebagai dasar bagi pemerintahan yang berbasis pluralistis dan memiliki signifikansi bagi penciptaan masyarakat madani. Pesan moral dan makna universal dalam piagam ini adalah: 1) kesatuan sosial politik di bawah kepemimpinan Nabi SAW mampu meredam egoisme kesukuan, etnisitas dan kelompok-kelompok yang berkonflik selama tidak kurang dari 120 tahun. Hal ini juga disebabkan oleh kepribadian dan sosok Muhammad SAW yang bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan (Watt, 1974); 2) mendukung diterimanya diversitas tanpa hegemoni, opresi dan dominasi; 3) partisipasi semua elemen masyarakat Madinah yang mendukung kebijakan politik dan tata pemerintahan yang diputuskan Nabi; 4) mengakui pluralisme yang mendorong keharmonisan karena terjaminnya kebebasan beragama (Sumbulah, 2008:37-45).

Menurut Pdt. Rahardjo (*wawancara*, 24-6-2014), kerukunan hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kasih. Misalnya tidak membalas kejahatan orang lain kecuali dengan doa. Landasan teologis kerukunan umat beragama bagi umat Kristiani adalah bahwa semua agama memberikan berkat bagi orang lain. Sedangkan landasan historisnya berangkat dari asal usul agama-agama Ibrahim. Adanya kemiripan ajaran ini merupakan isyarat bahwa kita bisa hidup rukun karena berasal dari sumber yang sama. Pdt Handoko (*wawancara*, 20-6-2014), menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bisa dimulai dari hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Pdt Budiono, kerukunan berarti

kebersamaan, karena kondisi rukun bisa tercipta ketika semua pihak memiliki persepsi yang sama tentang kebersamaan. Hal ini didasarkan pada nilai cinta kasih yang terdapat dalam Alkitab: “*kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri*” (Pdt. Budiono, *wawancara*, 24-6-2014). Dengan demikian, perintah mengasihi bukan terhadap umat Kristen saja, tetapi terhadap sesama tanpa membedakan agama, bukan untuk mengkristenkan. Pdt. Sumadikarya (2003) mengkritik kelompok evangelis yang melakukan kristenisasi dengan memberikan bantuan makanan, beasiswa atau pengobatan sebagai bentuk penyuluhan rohani (*spiritual bribery*). Upaya evangelisasi seperti itu akan menurunkan kredibilitas agama Kristen, karena tidak memenuhi konsep sebenarnya tentang pekabaran Injil sebagai kabar baik dan rentan memicu konflik, yang *unequivalent* (tidak sejalan) dengan kabar baik.

Bagi Romo Felix, semua agama memiliki landasan teologis kerukunan, yakni menebar kebaikan dan kasih sayang. Rukun berarti bisa menerima perbedaan. Dalam kerukunan umat beragama pada dasarnya ada satu nilai yang harus dijunjung dan diposisikan pada tempat yang tinggi, yaitu manusia. Menurutnya, semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. “Kalau Tuhan itu maha baik maka semua umat berhak disayangi dan diperhatikan. Dari dasar inilah, maka jika seseorang menyayangi Tuhan sama artinya dengan menyayangi ciptaan-Nya. Jika manusia menyayangi ciptaan-Nya, sama artinya dengan menyayangi Tuhan. Oleh karena alam semesta adalah ciptaan Tuhan, maka merusak alam sama halnya dengan mencoret-coret wajah-Nya. Semua manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan karena semua adalah citra dan gambaran-Nya” (Romo Felix, *wawancara*, 12-6-2014). Karena itu keharmonisan akan tercipta jika saling menghormati, saling menghargai dan berpartisipasi positif dalam menciptakan suasana yang baik.

Elite Hindu, Suwardika (*wawancara*, 14-6-2014), memaknai kerukunan umat beragama dimulai dari konsep tentang keesaan Tuhan. Jika

meyakini bahwa Tuhan ada satu, maka artinya semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang satu itu. Agama Hindu meyakini satu Tuhan, yakni Sang Hyang Widhi Wasa. Konsep hidup hinduisme adalah jika kita ingin dicintai Tuhan maka cintailah ciptaan-Nya. Menurutnya, landasan teologis kerukunan ada tiga, yakni: 1) *Trihitakarana*, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam; 2) *Tatwam ashi*, yang diibaratkan seperti tubuh yang ketika dicubit terasa sakit, maka orang lain yang dicubit akan merasakan hal yang sama; 3) *hukum karma*, yakni kepastian hukuman atas kejahatan yang dilakukan setiap orang. Agung (*wawancara*, 14-6-2014) memaknai kerukunan sebagai bentuk penghormatan dan saling membantu sesama umat beragama, baik dalam acara keagamaan maupun sosial. Kerukunan dan kedamaian akan tercipta karena didukung peranan susila dan ajaran berbuat baik. Dasarnya adalah Baghawat Gita, yakni *wejangan* Krisna kepada Arjuna dalam epos Mahabharata, bahwa apapun agama yang diyakini setiap manusia, tujuannya sama dan akan sampai kepada Tuhan. Menurut Rudi (*wawancara*, 14-6-2014), makna kerukunan adalah ketika semua umat beragama hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, yang dapat diciptakan melalui kegiatan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Landasan teologis kerukunan adalah ajaran untuk menghormati agama lain dengan prinsip *tatwam ashi*, menganggap orang lain sebagai diri sendiri.

Elite agama Budha memaknai kerukunan umat beragama sebagai sikap saling menghormati sesama, saling silaturahmi, dan saling mengunjungi (Khantidaro, *wawancara*, 14-6-2014). Hal senada diungkapkan Vimalaseno, bahwa memiliki keimanan terhadap kebenaran agama Budha bukan berarti boleh menyalahkan kepercayaan agama lain, karena di dalam *Kamala Suta* (penguat bukti kitab suci), dinyatakan bahwa terdapat banyak sumber pengetahuan dan kebenaran lainnya (*wawancara*, 22-6-2014). Bagi Tejaseno, makna kerukunan umat beragama adalah keharmonisan dan keutuhan, yang bisa muncul karena adanya kearifan dalam melihat dan memahami pandangan-

pandangan yang berbeda, bertoleransi dan tidak membedakan agama (*wawancara*, 22-6-2014). Ratanajayo (*wawancara*, 14-6-2014) memaknai kerukunan umat beragama sebagai suatu sikap menyadari bahwa umat beragama berbeda-beda, namun selama mereka saling menolong dan saling mengasihi, maka kerukunan akan tercipta. Landasan teologis kerukunan umat beragama menurut elite Budha adalah keyakinan adanya “*meta*” dan “*karuna*” yaitu cinta kasih dan kasih sayang. Apabila kebencian dibalas dengan kebencian maka kebencian itu tidak akan pernah berakhir. Apabila kebencian dibalas dengan cinta kasih dan kasih sayang maka kebencian itu akan berakhir meski harus melalui perjuangan yang sangat panjang. Dengan berlatih memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada orang yang membenci dan dibenci, maka kerukunan akan tercipta dan kebencian akan musnah (Tejaseno & Ratanajayo, *wawancara*, 14-6-2014). Landasan historisnya mengacu kepada kehidupan Sang Budha, sebagai guru yang memberikan keteladanan, sekalipun pernah difitnah dan diperlakukan dengan jahat, namun tetap memancarkan cinta dan kasih sayang. Karena itu, para bhiku dan samanera dilarang memukul, menyakiti atau membunuh, tidak saja terhadap manusia tetapi juga terhadap binatang. Hal ini karena ajaran Budha menekankan cinta dan kasih sayang pada sesama (Vimalaseno, *wawancara*, 14-6-2014). Bonsu Anton Triyono dari elite Konghucu (*wawancara*, 26-6-2014), berpandangan bahwa kerukunan beragama merupakan hal penting yang harus diupayakan secara terus menerus oleh semua umat beragama. Hal ini bisa diwujudkan di antaranya melalui pemahaman yang benar tentang pluralisme agama. Bagi Bonsu Hanompramana, pluralisme adalah adanya sikap saling menghargai dan saling mengenal. Hal ini didasarkan pada ajaran Konghucu, yakni “*huwaiji li sesiongti* (di empat penjuru lautan kita semua saudara). Maksudnya jika seseorang ingin maju, maka ia memiliki keharusan memajukan orang lain. Hal ini dapat meminimalisir sikap arogan dan eksklusif bahwa agamanya adalah satu-satunya yang mempromosikan kedamaian dan keharmonisan

(*wawancara*, 21-6-uni 2014).

Secarateologis, masing-masing umat beragama memiliki klaim tentang keyakinan agamanya sebagai penebar kedamaian. Islam memulai sapaan hangatnya dengan *assalamu’alaikum* untuk menebarkan kedamaian dan keselamatan, agama Kristen yang berbasis pada cinta kasih, agama Hindu yang menekankan *dharma*, agama Budha yang bermaksud melepaskan orang dari penderitaan, dan agama Konghucu yang selalu menekankan keseimbangan dan persaudaraan. Tidak sedikitpun persoalan tentang pendekatan teologis dan tekstual karena kebenarannya berlaku bagi pemeluknya, namun akan menimbulkan masalah ketika naskah tekstual-teologis tersebut dipandang dengan pendekatan historis. Hal ini karena akan memunculkan beragam interpretasi, yang tidak mungkin bisa dihindari antara satu komunitas dengan komunitas lain, ketika memandang dan memahami sesuatu. Oleh karena itu, problem kerukunan umat beragama perlu mendapatkan isi dan substansi baru, berupa kebersamaan menghadapi masalah-masalah kemanusiaan, tidak sekedar toleransi namun kerjasama dan kooperasi secara dinamis, *outward looking*, dan visioner (Kuntowijoyo, 1998: 364).

Upaya-upaya Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang

Pada umumnya semua elite agama sepakat bahwa menciptakan harmoni dilakukan secara intern dan antarumat beragama. Di kalangan Muslim, kerukunan intern umat beragama diupayakan melalui ceramah, sosialisasi dan diseminasi kepada jamaah, tentang bagaimana memberikan pemahaman agama yang santun dan toleran, memberikan pemahaman kepada jama’ah agar mereka bisa menghargai sesama Muslim dan non Muslim. Di samping itu, melalui delegasi di FKUB, NU berperan menjadi salah satu kekuatan yang mendorong terwujudnya kerukunan umat beragama. Hal senada disampaikan Gus Sampton, dengan memberikan catatan sedikit tentang forum FKUB yang terkadang melampaui batas, karena masuk pada wilayah membenarkan agama-agama (*wawancara*, 25-6-2014). Menurut Purwadyo,

upaya-upaya yang dilakukan untuk pembinaan kerukunan intern-umat beragama adalah melalui *ishlah* karena Islam adalah agama perdamaian. *Ishlah* dan mempererat tali persaudaraan dapat mengurangi gesekan yang terjadi di antara umat beragama. Upaya lain adalah saling memahami antar pemeluk agama, memahami ajaran tentang kebolehan atau larangan yang ada dalam masing-masing agama, sehingga bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Karena itu diperlukan dialog untuk saling berbagi ide dan gagasan terhadap isu-isu sosial-kemanusiaan, untuk mendapatkan solusi atas masalah kerukunan umat beragama (*wawancara*, 23-6-2014).

Elit Kristiani, Pdt. Kusumo Raharjo (*wawancara*, 28-6-2014), menyatakan bahwa usaha menciptakan kerukunan intern umat beragama dilakukan melalui Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG). Forum ini bertugas menjembatani antara elite agama Kristen dengan masyarakat, dalam bentuk aktivitas dan kegiatan sosial-kemanusiaan. Penciptaan kerukunan antarumat beragama dilakukan dengan prinsip menjunjung tinggi, tidak menghina dan menilai negatif ajaran agama lain. Hal ini senada dengan pandangan Pdt Budiono (*wawancara*, 4-6-2014), bahwa upaya-upaya membina kerukunan beragama adalah adanya kesadaran saling menghadiri undangan perayaan hari besar agama dan melakukan karya-karya kemanusiaan lainnya.

Elite Hindu juga memiliki program hubungan antarumat beragama. Menurut Suwardika (*wawancara*, 15-6-2014), dalam agama Hindu hubungan umat beragama diatur oleh PHDI, dengan membina umat melalui *dharma negara* dan *dharma agama*. Dharma negara memiliki tugas membina hubungan antara umat Hindu dengan pemerintah dan dengan antarumat beragama, sedangkan *dharma agama*, memberikan pembinaan hubungan intern umat Hindu, yang juga dikenal dengan istilah *Panca Yadnya*. *Dharma* agama dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang kerukunan umat beragama dan mendatangkan ahli agama untuk umat-

umat di pedesaan atau pedalaman. Di samping aktif di FKUB, hubungan agama Hindu dengan umat agama lain diwujudkan dalam program pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, juga dilakukan dialog intensif antar pemuka agama. Tradisi gotong royong dan saling menolong di antara umat beragama juga merupakan upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama. Mewujudkan budaya perdamaian dapat dilakukan melalui: **pertama**, pendekatan budaya, kearifan lokal dan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat di kalangan masyarakat bawah; **kedua**, memiliki prinsip bahwa kekerasan tidak bisa direspon dengan kekerasan; **ketiga**, menghormati dan menjaga eksistensi agama lain dan budaya setempat; **keempat**, berpandangan bahwa semua agama adalah ciptaan Tuhan. Karena itu menganggap dan menilai agama lain salah atau sesat adalah sebuah kekeliruan (Muhaimin AG, 2004: 51).

Memperkuat Suwardika, Agung menyatakan bahwa untuk membangun kerukunan umat beragama, diadakan kegiatan mingguan untuk menumbuhkan rasa persaudaran yang kuat, seperti pertemuan dan musyawarah tingkat desa setiap hari Minggu, sarasehan di kalangan ibu-ibu setiap Senin, dan paguyuban di kalangan bapak-bapak di hari Kamis (*wawancara*, 19-6-2014). Hal senada dinyatakan Suwardika, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap agama dalam memimpin, saling menghargai, dan gotong royong dalam membuat rumah, saling membantu pada saat perayaan hari besar keagamaan. Rudi berpandangan bahwa gaya kehidupan sehari-hari (*everyday lifestyle*) yang saling menghormati dengan saling mengunjungi satu sama lain ketika hari raya dan terlibat dalam acara bersih desa, merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama (*wawancara*, 29-6-2014).

Adapun upaya yang dilakukan kalangan Budha untuk hubungan intern dan antar umat beragama adalah melalui FKUB. Herman (mahasiswa STAB Batu), seringkali menghadiri undangan dialog

lintas agama di UIN Maliki Malang, menghadiri perayaan keagamaan, saling menghormati dan saling membuka diri (*wawancara*, 14-6-2014). Vimalaseno juga membangun hubungan antarumat beragama dengan aktif menghadiri forum-forum lintas agama dan terbuka menghadapi perbedaan (*wawancara*, 14-6-2014). Menurut Tejaseno, vihara juga memiliki program untuk menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama, dengan membuka diri menerima umat agama lain untuk berlatih meditasi dan kegiatan lainnya, serta berkunjung ke institusi agama lain, seperti biara-susteran dan pondok pesantren.

Elite Konghucu melakukan upaya-upaya pembinaan kerukunan antarumat beragama dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat dan mengundang semua elemen agama untuk hadir dalam perayaan hari besar keagamaan. Mereka menampilkan budaya masing-masing seperti wayang, hadrah, dan tari gambus. Kebersamaan yang terus diciptakan akan menghasilkan sinergi yang baik antarumat beragama di Malang. Bagi Bonsu Hanom, budaya dapat mendekatkan satu komunitas agama dengan komunitas agama lain (*wawancara*, 2 -7-2014). Dalam konteks inilah, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya upaya saling mengenal antar komunitas umat beragama tersebut, maka akan dapat menghilangkan prasangka yang tidak diperlukan. Hal ini bisa dilakukan secara langsung melalui dialog dan pertemuan dalam kehidupan sehari-hari (dialog kehidupan), maupun secara tidak langsung melalui forum, lembaga maupun aktivitas penelitian dan studi (JB. Banawiratma, 1998:100). Dengan budaya saling menghargai dan membuka diri terhadap agama-agama lain, akan dapat membangun sikap saling percaya (*mutual trust*). Terdapat beberapa upaya yang dibangun untuk merintis kembali *mutual trust* antar komunitas agama; **pertama**, mengembalikan *mutual trust* akan sangat tergantung pada kemampuan umat beragama dalam meretas rekonsiliasi. Untuk membangun saling percaya antar komunitas agama diperlukan kehendak untuk ‘melupakan’ relasi yang kurang baik dalam warisan sejarah kemanusiaan masa

lalu. Dalam kasus interaksi antar komunitas agama di Indonesia, perlu dilakukan pencarian landasan spiritual dalam penanganan konflik dan kekerasan. **Kedua**, dalam rangka merespon realitas konflik dan kekerasan, komunitas agama-agama perlu membangun gerakan alternatif yang didasarkan pada semangat perdamaian dan anti kekerasan. *Mutual trust* juga akan bisa terbangun apabila terjadi dialog-dialog emansipatoris. Dalam proses dialog emansipatoris, komunikasi antar-sesama lebih didasarkan pada prinsip keterbukaan, kesetaraan, pembebasan dan tidak dipenuhi prasangka, apalagi *value judgement* dan stereotype tertentu. **Ketiga**, *mutual trust* bisa terbangun ketika ada ‘proyek bersama’ untuk mencapai tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dalam konteks ini, berbagai komunitas agama bisa bersatu dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kerukunan Umat Beragama di Malang

Menurut KH Chamzawi (*wawancara*, 18-6-2014), adanya budaya saling menghormati, memahami dan menghargai merupakan entitas pendukung kerukunan. Gus Shampton juga berpandangan bahwa saling mendukung dan saling mengerti akan dapat mewujudkan tercapainya kerukunan umat beragama. Sedangkan penghambatnya adalah karena egoisme, mudah menyalahkan orang lain, menganggap bahwa dirinya paling benar dan selalu menyerang paham dan atau/keyakinan orang lain. Oleh karena kurangnya saling memahami, menghargai dan menghormati maka timbul konflik dan perpecahan. Gus Sampton berpandangan bahwa ketidakpahaman, eksklusif dan keengganan memahami agama lain akan menghambat terciptanya kerukunan. Agus Purwadyo (*wawancara*, 23-6-2014), menyatakan bahwa sikap positif yang mendukung terciptanya kerukunan umat beragama adalah keterbukaan, menghormati keyakinan orang, tidak mengganggu dan tidak kaku. Adanya kelompok dan aliran-aliran baru dalam Islam sendiri, yang seringkali membid'ahkan golongan yang lain, merupakan

hambatan berat bagi terciptanya kerukunan. Karena itu untuk mencegah dan menangani konflik, harus dilakukan dialog secara intensif, demi melahirkan sikap keberagamaan yang terbuka dan inklusif. Teologi inklusif telah diteladankan Rasulullah di Madinah, dengan menjamin perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara non Muslim sepanjang tidak memusuhi Islam. Penghargaan atas eksistensi agama lain ini juga dilakukan generasi sahabat. Beberapa keberhasilan ekspansi politik tidak selalu diikuti keberhasilan da'wah secara kuantitatif, karena menjunjung prinsip *no compulsion in religion*, seperti dalam QS. 2: 256.

Elite Kristiani, Pdt. Kusumo (*wawancara*, 24-6-2014), berpandangan bahwa terciptanya kerukunan umat beragama berawal dari pribadi yang mau belajar kepada orang lain. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi, komunikasi dan bergaul antarumat beragama mulai lingkup terkecil hingga yang lebih luas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pribadi yang merasa dirinya paling benar, kurang sosialisasi, kurang komunikasi dan sikap fanatik yang berlebihan. Interpretasi dan pemikiran teologis yang berbeda tentang doktrin dan monopoli kebenaran dan keselamatan misalnya, juga dapat menjadi salah satu sumber perselisihan dan konflik antarumat beragama (Daya, 1998: 109). Oleh karena itu, keterlibatan dalam forum-forum dialog antarumat beragama, dapat membantu mencegah terjadinya salah paham dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan secara bersama-sama. Menurut Pdt. Budiono (*wawancara*, 24-6-2014), hal yang mendukung kerukunan adalah: 1) adanya kemauan umat beragama untuk membuka diri dan berdialog dengan komunitas agama lain; 2) adanya kesadaran terhadap mandat Allah, agar umat manusia bisa saling menolong dan bahu-membahu, dalam rangka mewujudkan kerukunan; 3) kepatuhan terhadap pemerintah yang melindungi dan menjadi payung bagi watak dan realitas kebhinekaan masyarakat Indonesia, sebagaimana diajarkan Alkitab, yakni kewajiban menghargai pemimpin sebagai wakil Allah di bumi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sikap ekstrem, *truth claim* dan tidak menghargai

agama lain.

Menurut Romo Felix (*wawancara*, 18-6-2014), pada prinsipnya keyakinan Katolik tidak menolak keyakinan orang-orang agama lain. Faktor pendukung kerukunan umat beragama adalah budaya dan semangat gotong royong dan bekerjasama, saling silaturahmi, saling menolong, dan saling membantu. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah adanya sikap merendahkan dan menyalahkan orang lain, kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama, serta kurangnya penghayatan agama di tengah masyarakat. Melalui dialog, diskusi dan seminar secara intensif, maka kesalahpahaman dapat diminimalisir sehingga tidak sering memicu konflik. Di samping itu, juga dapat dilakukan dialog teologis dan dialog karya. Menciptakan kerukunan tidak mudah, namun umat Katolik tetap mengusahakannya, di antaranya melakukan pembinaan se-wilayah keuskupan Malang, yang meliputi kota Malang hingga Banyuwangi. Menurut Romo Raymundhus (*wawancara*, 7-7-2014), kerukunan umat beragama bisa terwujud dengan saling menghormati dan menghargai, sedangkan egoisme dan keengganan seseorang untuk memahami dan mengajarkan kebenaran kepada orang lain merupakan kendala besar bagi harmoni agama-agama.

Pergeseran sikap dari eksklusif ke inklusif dan pluralis, terjadi setelah Konsili Vatikan tahun 1962-1965. Babakan ini menjadi tonggak sejarah bagi umat Kristen dalam menjalin hubungan dengan umat non-Kristen. Gagasan dalam *Nostra Aetate* ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya sekretariat antarumat beragama, yang memfasilitasi dialog-dialog antaragama, di Timur dan di Barat (Akasheh dan Riyanto, 2000: 8-13). Hans Kung (1998: 9-32), menyatakan bahwa Konsili Vatikan II melahirkan keyakinan teologis bagi umat Kristen bahwa ada dua jalan untuk meraih keselamatan, yakni jalan Kristiani dan jalan non-Kristiani. Dengan pandangan bahwa agama-agama di luar Kristen juga merupakan jalan keselamatan, maka klaim bahwa Kristianitas adalah satu-satunya jalan keselamatan

harus ditolak demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis. Pergeseran sikap dari eksklusif ke inklusif ini juga dapat dilihat dalam tiga model evolusi teologis, yakni: fundamentalisme evangelis, konservatisme evangelis, dan ekumenisme evangelis (Knitter, 1985:75-77). Bahkan menurut Coward (1999:59), ada tiga pendekatan mutakhir yang berkembang dalam tradisi Kristiani era modern, yakni: pendekatan kristosentris yang dibidani Karl Rahner, pendekatan teosentris yang digagas John Hick (1988), Paul Tillich dan Wilfred Cantwell Smith, dan pendekatan dialogis yang dikembangkan oleh Raimundo Panikkar (1999).

Elite Hindu, Agung (wawancara, 16-6-2014) berpandangan bahwa karakter dan budaya masyarakat yang saling menghormati dapat mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama, sedangkan cara pandang dan cara beragama yang terlalu fanatik akan menghancurkannya. Menurut Rudi, kebersamaan merupakan sikap yang mendukung terciptanya kerukunan, sedangkan fanatisme agama yang berlebihan dan memusuhi agama lain adalah penghambatnya (wawancara, 20-6-2014). Bagi Suwardika (wawancara, 19-6-2014), sikap yang mendukung kerukunan adalah kebersamaan yang tumbuh misalnya melalui tradisi *selamatan*. Dalam acara tersebut, undangan tidak hanya bagi mereka yang beragama Hindu, akan tetapi juga dihadiri umat agama lain. Demikian juga dengan *slametan* bersih desa atau kegiatan lainnya, yang melibatkan semua umat beragama. Dengan demikian *slametan* dan beragam medan budaya dapat memperkuat kerukunan umat beragama karena menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan tanpa dibedakan sekat-sekat agama. Geertz (2000) menyatakan bahwa Islam di Indonesia lahir dalam konteks animisme dan hinduisme, sehingga mempengaruhi warna Islam Jawa. Ritual *slametan* menjadi salah satu media berbagai kelompok agama dalam membangun kebersamaan dan merupakan inti ritual agama Jawa yang paling populer dan bertahan hingga sekarang. Demikian temuan penelitian Beatty (1999) di Banyuwangi, Woodward (1988) di Yogyakarta, dan Hefner (2000: 91-128) di

Pasuruan. Melalui *slametan*, masyarakat Jawa yang memiliki diversitas bisa disatukan, karena dalam ritual itu tidak ada jarak antara si kaya dan si miskin, antara penganut Islam santri dan abangan dalam kategorisasi Geertz (1981), juga di antara penganut agama-agama yang berbeda-beda.

Dalam perspektif elite Budha, kerukunan umat beragama tercipta karena adanya pemahaman terhadap orang lain dengan cara meditasi, karena memahami orang lain dimulai dari dalam diri. Melalui meditasi, seseorang akan mengetahui tujuan hidup dan berusaha menjadi orang baik, agar berbahagia di dunia dan setelah meninggal (Bikhu Kantidaro, wawancara, 14-6-2014). Menurut Vimalaseno, kebersediaan membuka diri dan tidak menganggap agamanya paling benar dan menganggap agama lain salah adalah sikap positif untuk mewujudkan kerukunan (wawancara, 14-6-2014). Tejaseno melihat sikap toleran adalah kunci terjadinya kerukunan dalam keluarga, agama dan masyarakat (wawancara, 22-6-2014). Bagi Ratanajayo (wawancara, 15-6-2014), keterbukaan, komunikasi dan tidak mudah terpancing isu-isu bernuansa SARA merupakan sikap positif yang menumbuhkan kerukunan. Adapun hal-hal yang menghambat kerukunan, menurut Kantidaro ada tiga: 1) fanatisme berlebihan yang menganggap agamanya paling benar dan menganggap agama lain salah; 2) nafsu pribadi berupa keinginan kuat mengajak orang lain mengikuti agamanya dengan jalan kekerasan sekalipun; 3) nafsu kelompok yang menginginkan kelompok lain mengikuti atau memusuhi kelompok lain yang tidak sepaham (wawancara, 14-6-2014), menutup diri, fanatisme, dan dangkalnya pengetahuan (Vimalaseno, wawancara, 14-6-2014), intoleransi dan *truth claim* (Tejaseno, wawancara, 22-6-2014), merendahkan dan menghina agama lain (Ratanajayo, wawancara, 22-6-2014).

Menurut elite Konghucu, kerukunan umat beragama bisa diwujudkan dengan dasar falsafah Konghucu, “kalau engkau ingin maju maka majukanlah orang lain dulu, jika ada orang lain menderita maka berupayalah menghilangkan penderitaan orang tersebut”

(Bonsu Hanompramana, *wawancara*, 21-6-2014). Menurut Bonsu Hanom (*wawancara*, 21-6-2014), hal yang mendukung terciptanya kerukunan umat beragama adalah adanya kesadaran umat beragama untuk bersikap inklusif terhadap komunitas agama lain. Dengan demikian sikap eksklusif dapat mengganggu terciptanya harmoni dan kerukunan, bahkan memicu konflik dan kekerasan atas nama agama. Eksklusivisme bisa muncul karena adanya kekaguman atas keunggulan diri dan kelompoknya. Menurut teori psikologi, konflik dan kekerasan atas nama agama terjadi akibat terlukainya perasaan narsistik, yakni perasaan mengagumi diri karena penilaian subyektif terhadap kesempurnaan dan keunggulannya (Fromm, 2004: 281). Memperkuat teori Fromm, Beuken dan Kuschel (2003:xiv-xxv) berkesimpulan bahwa kekerasan atas nama agama bisa dilihat dari dua perspektif: **pertama**, pembacaan agama tentang hubungan sosial yang berfungsi sebagai legitimasi keabsahan perilaku kekerasan karena berperan sebagai ideologi; **kedua**, agama adalah faktor budaya identitas. Beberapa kasus kekerasan bernuansa agama, adalah bukti konkrit bahwa agama memiliki akar dan legitimasi atas terjadinya konflik dan kekerasan. Simbol-simbol keagamaan yang merupakan representasi masyarakat demikian kental sifat komunalnya (Azra, 1999:18). Melalui simbol-simbol inilah komunalisme agama sering menjadi pemandangan dalam relasi agama-agama. Semangat dan identitas komunalisme yang kuat akan rentan memicu kekerasan agama.

PENUTUP

Konstruksi elite agama tentang pluralisme sangat variatif, yakni keragaman sebagai kenyataan sosial, sikap menghargai dan terbuka terhadap agama lain, dan kesetaraan semua agama di hadapan Tuhan. Keragaman pandangan tersebut dapat dikategorikan pada moderat dan konservatif. Demikian juga dengan makna kerukunan umat beragama, ada yang memaknainya sekedar menghargai dan menghormati keyakinan agama lain yang bersifat ko-eksistensi, namun adapula yang berpandangan lebih progressif dan pro-eksistensi. Upaya mewujudkan kerukunan umat

beragama dilakukan secara internal terhadap komunitas agama masing-masing, melalui sosialisasi dan penguatan berbasis komunitas dan eksternal dengan bekerjasama dengan agama-agama lain untuk mengatasi persoalan kemanusiaan. Kendati demikian, masih ada sikap negatif yang menghambat kerukunan umat beragama, yakni fanatisme sempit, egoisme, *truth claim* dan keengganan memahami dan bersikap terbuka terhadap agama lain. Sebaliknya, para elite agama juga mengembangkan sikap-sikap positif berupa membangun kesadaran akan pentingnya membangun *mutual trust*, penghargaan atas keragaman, intensifikasi dialog dan kerjasama antarumat beragama, sebagai pendukung bagi terciptanya kerukunan dalam keragaman agama dan harmoni dalam perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Muhaimin. 2004. *Damai di Dunia Damai untuk Semua*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI.
- Akashah, Khaled & Armada Riyanto. 2000. "Sikap Dialogal Gereja: Komitmennya Dalam Dialog dengan Islam" dalam *Agama-Kekerasan Membongkar Eksklusivisme*. Ed. Armada Riyanto. Malang: Dioma-STFT Widyasasana.
- Al-Bukhārī, Imām. 1994. *Al-Jāmi' al-Shahīh*. Beirut: Dār al-Fikr, IV.
- Armstrong, Karen. 2001. *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan oleh Orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4000 Tahun*, ter. Zaimul Am. Bandung: Mizan, 2001.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Banawiratma, JB. 1998. "The Poorest of the Poor Mempersatukan Agama-agama" dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. Ed. Andito. Jakarta: Pustaka

- Hidayah.
- Beatty, Andrew. 1999. *The Varieties of Javanese Religion*. Princeton: Princeton University Press.
- Beuken, Wim dan Kuschel, et al. 2003. *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, ter. Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bulac, Ali. 2001. "Piagam Madinah" dalam *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Ed. Charles Kurzman. Jakarta: Paramadina.
- Coward, Harold. 1999. *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama*. Jakarta: Kanisius.
- Daya, Burahanuddin. 1998. "Hubungan Antaragama di Indonesia", dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. Ed. Andito. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Fromm, Eric. 2004. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, ter. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fannani, Muhyar. 2003. "Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat" dalam *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Salatiga: Jurusan Syariah dan P3M STAIN Salatiga.
- Geertz, Clifford. 1970. *The Interpretation of Culture*. London: Sage Publication.
- Haryatmoko, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*, Diklat Kuliah Filsafat Ilmu. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Hick, John. 1988. *Problems of Religious Pluralism*. London: The Macmillan Press LTD.
- Hefner, Robert W. 2000. "Mengislamkan Jawa? dalam *Islam Pasar Keadilan Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi*, ter. Aminudin. Yogyakarta: LKiS.
- Knitter, Paul F. 1985. *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions*. Maryknoll: Orbis Books.
- Kung, Hans. 1998. "Sebuah Model Dialog Kristen-Islam" dalam *Paramadina: Jurnal Pemikiran Islam*. Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember.
- Koentowibisono. 2003. *Diklat Kuliah Filsafat Ilmu*. Program Doktor Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mathar, M. Qasim. 2005. *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Panikkar, Raimundo. 1999. *Dialog Intra Religius*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rachman, Budhy Munawar. 2010. *Argumen Islam Untuk Pluralisme*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Riyanto, Armada. 2004. "Membongkar Eksklusivisme Hidup Beragama" dalam *Agama Kekerasan*. Malang: Dioma.
- Schuon, Fritjof. 1993. *The Transcendent Unity of Religions*. Illinois: The Theosophical Publishing House.
- Sumbulah, Umi. 2008. "Muhammad SAW Sebagai Peletak Dasar Pemerintahan Pluralistis dalam Islam" dalam *Perspektif Jurnal Agama dan Kebudayaan*. Malang: STFT Widayasastra.
- dan Nurjanah. 2012. *Pluralisme Agama Lokalitas Makna dan Kerukunan Umat Beragama*. Malang: UIN Press.
- Sumardikarya, Pdt. Kuntadi. 2003. "Generalisasi Berlebihan Berarti Gagap Agama" dalam <http://www.Islamlib.com/id/page.php?page=article&id=381>.
- Wahid, Abdurrahman. 1998. "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama," dalam *Passing Over Melintasi Batas Agama*. Ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama - Paramadina.
- Watt, Montgomery. 1974. *The Majesty That Was Islam*. London: Great Britain.
- Woodward, Mark R. 1988. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. An Arbor: UMI.